

JURNAL Politikologi

Vol. 7, No. 1, Juni 2019

Ella Wargadinata

Analisis Sistem Pemilu Noken
Berbasis Konseptual dan *Empirical*

Eva Eviany

Strategi Komunikasi Politik

Syaefullah

Patologi Birokrasi dalam Penetapan Pimpinan Pratama

David Mayor, Ali Syahputra

Penerapan Asas *Fairness* dan Non-Diskriminatif
dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2015

Anwar Rosshad, Dwi Yulianti

Kebijakan Dana Desa dalam Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal
di Desa Kakiang Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa

Wike Anggraini, Arwanto

The Importance of Merit System in Public Organization

Teguh Ilham

Ulama dan Jawara dalam Dinamika Politik Lokal Banten

Saila Alfina

Implementasi Peraturan Bupati Tentang Urusan Perizinan
di Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar

Yayat Sudrajat, Mahtup Basuki

Peranan Sekretariat dalam Menunjang Fungsi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas
Provinsi Jawa Tengah

Arya Mahardika, Parino

Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Koto Taluk
Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi
Provinsi Riau



PROGRAM STUDI POLITIK PEMERINTAHAN
FAKULTAS POLITIK PEMERINTAHAN
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Politikologi

Vol. 7

No. 1

Hlm. 1 — 122

Sumedang, Juni 2019

ISSN 2354-9858

ULAMA DAN JAWARA DALAM DINAMIKA POLITIK LOKAL BANTEN

Teguh Ilham

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

t.ilham@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Cleric and Champion in the Dynamics of Banten Local Politics. Banten is a province where the influence of traditional elites is still felt in various aspects of people's lives. Cleric (Ulama) and Champion (Jawara) as two components of the traditional elite separately have a fluctuating influence in the course of Banten's local politics. This study aims to map how the influence of each of the traditional elites during the new order and post-reform. In this study the library research method is used by studying various sources such as books, journals, documents, and journalistic reports in the form of both printed and electronic reporting. The results of the study show that at the time of the new order the cleric (ulama) played an important role for the central government because of its strong influence in the midst of society. On the other hand, it was found that in post-reform, champions influenced and even occupied local politics by being directly involved in democratic procedures through general elections. Today, even though they are not directly involved in local politics, the position of cleric (ulama) is still quite strategic especially in mobilizing the community.

Keywords: clerics, champions, local politics, Banten

ABSTRAK

Ulama dan Jawara dalam Dinamika Politik Lokal Banten. Banten merupakan provinsi yang dipengaruhi oleh elit tradisionalnya masih terasa pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ulama dan Jawara sebagai dua komponen elit tradisional secara terpisah memiliki pengaruh yang fluktuatif dalam perjalanan politik lokal Banten. Kajian ini bertujuan untuk memetakan bagaimana pengaruh masing-masing elit tradisional tersebut pada saat orde baru dan pasca reformasi. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kepustakaan dengan mengkaji berbagai sumber seperti buku, jurnal, dokumen-dokumen, dan laporan jurnalistik dalam bentuk pemberitaan baik cetak maupun elektronik. Hasil kajian menunjukkan bahwa pada saat orde baru ulama memegang peranan yang penting bagi pemerintah pusat karena pengaruhnya yang sangat kuat di tengah-tengah masyarakat. Di lain pihak, ditemukan bahwa pada pasca reformasi, jawara memengaruhi bahkan sebagian mengokupasi politik lokal dengan terlibat langsung dalam prosedur demokrasi melalui pemilihan umum. Dewasa ini, walaupun tidak terlibat langsung dalam politik lokal, posisi ulama masih cukup strategis terutama dalam menggerakkan masyarakat.

Kata kunci: ulama, jawara, politik lokal, Banten.

PENDAHULUAN

Banten berlokasi di ujung barat Pulau Jawa. Sebagai provinsi baru yang merupakan hasil pemisahan dari Jawa Barat yang terbentuk pada tahun 2000, Banten merupakan suatu kesatuan politik di masa lalu dalam bentuk kesultanan

yang berjaya dari tahun 1526 M sampai 1828 M. Sejak Indonesia merdeka hingga menjadi provinsi sendiri, Banten merupakan bagian dari Jawa Barat. Saat ini Banten memiliki empat kabupaten yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan juga empat kota yaitu Kota

Cilegon, Kota Tangerang, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan.

Banten merupakan salah satu provinsi yang merupakan bagian dari keragaman suku dan adat istiadat yang sangat khas Indonesia, termasuk dalam pola kepemimpinan tradisionalnya. Walaupun kepemimpinan tradisional tidak terikat secara formal dengan hukum-hukum positif negara tetapi ia diakui oleh negara dan yang tidak kalah pentingnya, oleh masyarakat setempat. Banten sebagai salah satu provinsi di Indonesia masih mempunyai karakteristik kultural yang tinggi terutama dilihat dari kepemimpinan tradisionalnya yang efektif dalam relasinya dengan masyarakat Banten.

Agama terbesar di Banten adalah Islam yang dengan jumlah pemeluknya mencapai 95 persen Islam, Kristen Protestan 3 persen, Buddha 1,5 persen, Katolik 1,29 persen, Hindu 0,10 persen, Aliran 0,03 persen dan Konghucu 0,01 persen. Berdasarkan persebaran agama tersebut dapat dilihat bahwa Islam merupakan agama mayoritas dianut oleh masyarakat Banten. Melihat data tersebut kepemimpinan para pemuka agama Islam memegang peranan yang sangat strategis. Biasanya ulama bernaung di bawah pondok pesantren. Di Banten jumlah pesantren cukup banyak, mencapai 3.122 pondok pesantren yang tersebar di delapan kota/kabupaten (Purwadi: 2017).

Jika dilihat dari sejarah, penghormatan masyarakat Banten kepada ulama dan jawara ini sangat bisa dipahami dari rekam jejak kepemimpinan mereka pada masa lalu. Berbagai macam pemberontakan yang pernah terjadi di Banten seperti Geger Cilegon 1888 (Kartodirdjo: 1984) dan Pemberontakan kelompok Komunis 1926 (Williams: 2003) telah terukir peran besar kepemimpinan ulama dan jawara dalam mereda pemberontakan-pemberontakan tersebut. Bahkan pada perang 1945 para ulama menempati pos-pos kepemimpinan formal baik sipil maupun militer dimulai dari residen hingga kepala desa. Begitu juga dengan kepemimpinan militer, Kyai Sjam'un sebagai pimpinan militer yang kelak bergelar Brigadir Jenderal. (Suharto: 2001).

Elit lokal Banten, dalam hal ini ulama dan jawara, walaupun bukanlah merupakan suatu rival tapi mengalami berbagai dinamika yang melingkupi keduanya sejak rezim orde baru hingga pasca reformasi. Berbagai macam penelitian telah dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Suhaedi (2003) menunjukkan bahwa peran jawara mengalami peningkatan sejak reformasi dimulai. Penelitian Karomani (2009) dan Muslim dkk (2015) menemukan bahwa terdapat pergeseran dominasi elit antara ulama dan jawara. Dulu ulama mendominasi struktur stratifikasi sosial masyarakat Banten dan sekarang dominasi tersebut bergeser kepada jawara. Namun, diketahui juga bahwa dari aspek kekuasaan sosial, ulama lebih mendominasi daripada jawara (Muslim, dkk: 2015).

Meskipun di antara elite ulama dan jawara di Banten dipandang sebagai sebuah kesatuan kepemimpinan lokal, sering kali di antara kedua elit tersebut muncul kemandegan komunikasi karena perbedaan kepentingan dan peran-peranan. Dilihat dari peranannya memang kedua kelompok ini berbeda, Jawara cenderung berpedoman kepada tradisi, sementara ulama lebih berfokus kepada kemurnian agama. Kedua kelompok ini sering kali berseberangan terutama menyangkut hal-hal yang dianggap prinsip oleh keduanya. Dalam ranah politik lokal, kedua elit tersebut memiliki relasi kekuasaan yang saling bergeser dan dinamis terutama terkait peran sosial mereka.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis peran politis dari ulama dan jawara sebagai elit tradisional dalam dinamika politik lokal di Banten pada zaman orde baru dan reformasi.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode penelitian Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan adalah studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya (Mardalis: 1999). Selain itu, studi kepustakaan juga dapat dilakukan dengan memelajari berbagai buku

referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono: 2006).

Studi kepustakaan juga dapat berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir:1988). Menurut Sugiyono (2012) studi kepustakaan dapat berupa kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini sumber-sumber data dan informasi didapatkan dari penelitian terdahulu, dokumen-dokumen relevan, pemberitaan secara daring dan media cetak seperti koran dan majalah. Semua sumber tersebut kemudian dikaji dan dianalisis untuk mendapatkan suatu pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ulama dan Jawara dalam Konteks Sejarah di Banten

Kajian terhadap kondisi sosio-kultural dari masyarakat Banten tidak mungkin dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap sejarah masyarakat daerah ini. Danial (2016) berpendapat bahwa munculnya kesultanan Banten merupakan titik tolak dalam menggali sejarah Banten yang membentuk identitas dari masyarakat Banten. Dilihat dari asal mulanya masyarakat, sebagian besar masyarakat yang mendiami Banten berasal dari Jawa dan Cirebon yang dalam dinamikanya mengalami pembauran dengan penduduk beretnis Sunda, Bugis, Melayu dan Lampung (Danial: 2016). Pembauran tersebut terlihat dari berbagai karakteristik penduduknya yang berbeda dari daerah asal masing-masing mereka. Dari segi bahasa dan adat istiadat mereka memiliki ciri khas sendiri, begitu pula dari segi fisik dan watak masyarakatnya. Jika dilihat dari unsur pembentukan kebudayaannya, hampir tidak terlihat pengaruh Hindu-Jawa.

Hal ini dikarenakan pengaruh Islam sangat kuat pada sendi-sendi kehidupan masyarakat Banten (Danial: 2016). Ini sejalan dengan penelitian Van Bruinessen (1995) terkait penelitiannya tentang institusi agama di Kesultanan Banten. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa:

"The populations of Banten were more faithful than other Javanese in the observance of such religious obligations as the fast during Ramadhan and the payment of Zakat. Moreover, unlike elsewhere the payment of zakat in Banten served to strengthen independent ulama – the Kiai or guru – as against the official religious functionaries who usually administered (and enforced) zakat (Van Bruinessen, 1995)."

Agama sangat kuat pengaruhnya bagi masyarakat Banten. Oleh karena itu, dalam konteks ini, ulama atau yang disebut dengan kyai menempati posisi yang tinggi dan penting dalam struktur masyarakat Banten. Kyai yang secara khusus merujuk kepada kelompok Islam Tradisional tidak hanya dipersepsikan sebagai pemimpin agama tetapi juga pemimpin masyarakat sehingga sering kali pengaruhnya bisa melebihi pemimpin formal, terlebih di daerah perdesaan. Bahkan, pengangkatan dari pemimpin-pemimpin formal tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengaruh para kyai.

Pola relasi antara masyarakat, khususnya santri, dengan ulama di Banten juga tergolong menarik. Hubungan antara keduanya tidak hanya berkaitan dengan transfer ilmu, tetapi juga pengharapan berkah dari kaum ulama. Keyakinan ini cukup mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat dengan ungkapan lokal *'ciduhna kyai, barokah keur santri'* yang artinya air liur kyai merupakan berkah bagi santri. Pola hubungan patron-klien ini menjadi menarik karena karakternya berbeda dengan hubungan patron-klien Scottian yang berbasiskan pertukaran materi (Muslim, dkk:2015).

Secara umum diketahui bahwa ulama memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat Banten. Namun, secara lebih spesifik

terdapat beberapa kategorisasi ulama yang ada di Banten. Pertama, ulama pendidikan yaitu ulama yang mengajar di pesantren. Kedua, ulama organisasional yaitu ulama yang aktif dalam organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Persis, dsb. Ketiga, ulama politik yaitu ulama yang terlibat aktif dalam organisasi partai politik. Keempat, ulama aktivis, yaitu ulama yang terlibat dalam pergerakan Islam baru. Terakhir Kelima, ulama semioffisial MUI (Ichwan: 2013).

Selain ulama, terdapat kelompok elit tradisional lainnya yang juga mempunyai pengaruh di Banten, yaitu Jawara. Dilihat dari sejarahnya, kelompok jawara ini tidak hanya ada di Banten, namun juga terdapat di berbagai daerah khususnya di Pulau Jawa. Jawara atau secara umum diartikan sebagai 'jago' tidak bisa dipisahkan dengan konsep kekuasaan semenjak zaman prakolonial. Jago digunakan sebagai alat penguasa untuk mempertahankan kerajaannya dari pihak lain. Bahkan, sering kali raja juga merupakan seorang yang jago yang biasanya memperoleh legitimasi setelah menerima wahyu kedaton. Dengan kondisi ini, maka dalam konteks kekuasaan, tinggi dan rendahnya tingkat kekuasaan politis seorang penguasa ditentukan oleh jumlah jago yang dimiliki (Ong Hok Ham, 2002). Selain di Banten yang disebut sebagai jawara, di daerah lain juga memiliki penyebutan lain seperti blater di Madura dan bandit atau kecu di Jawa secara umum (Rozaki, 2004).

Sama halnya dengan kyai yang memiliki kekuatan spiritual, jawara juga bisa memiliki kekuatan tersebut jika mempelajari dan mendalaminya. Kekuatan spriritual yang dipelajari oleh para jawara dari kyai disebut dengan 'magi'. Jika didefinisikan, jawara merupakan orang yang memiliki beberapa karakteristik unggul seperti kekayaan, fisik yang kuat dan magi (hikmah, kekebalan, kebatinan) yang diperoleh dari kyai (Tihami: 1992). Jika dilihat dari fisiknya, jawara merupakan orang yang memiliki keterampilan beladiri silat dan tubuhnya kebal dari sabetan benda tajam. Sedangkan dari ilmu hikmah yang didapatnya bisa berasal dari kyai ataupun semata-

mata karena keturunan. Penampilan seorang jawara biasanya menggunakan baju serba hitam dan waspada dalam setiap gerak-gerik dengan senjata yang selalu terselip di pinggangnya.

Di Banten, pada awalnya jawara muncul sebelum berdirinya kesultanan Banten. Jawara merupakan orang-orang yang dilatih dan dipersiapkan sebagai pengawal kerajaan Pajajaran yang berada di bawah kekuasaan Pucuk Umum di Banten Lama. Sesuai dengan fungsinya sebagai pengawal kerajaan, jawara bertugas dalam mengawasi kelompok-kelompok masyarakat, mengumpulkan upeti, serta memastikan efektifnya pemerintahan walaupun dengan jalan represif. Pasca berakhirnya Kerajaan Pajajaran dan berkuasanya Sultan Hasanudin, para jawara tersebut menyatakan kesetiannya kepada penguasa baru. Dalam perjalanannya, mereka yang mahir dalam ilmu bela diri dan kekebalan juga mempelajari agama Islam dari para ulama sehingga aktualisasi kejawaraannya berbasiskan nilai-nilai Islam (Adimihardja:1991 dalam Karomani: 2009). Secara lebih spesifik murid para kyai dapat dibedakan atas tiga kelompok. Pertama adalah yang mempunyai kemampuan bakat di bidang ilmu agama, sehingga kelak akan menjadi kiai pula seperti gurunya, dan kedua adalah para santri yang mempunyai bakat yang berkaitan dengan bela diri. Sosok santri yang kedua inilah yang oleh kiai dibina dalam hal kekuatan fisik, dan kemudian menjadi jawara Banten yang biasa diklasifikasikan. Walaupun demikian, tidak semua jawara yang menginternalisasi nilai-nilai keislaman.

Pada abad ke-19 mulai terjadi pergeseran terhadap citra jawara. Pada ketika itu, Daendels datang dan menghapuskan kesultanan Banten sehingga mengakibatkan rusaknya tatanan sosial masyarakat. Dalam kondisi kekacauan ini para kyai, terutama di perdesaan-perdesaan muncul sebagai pemimpin perlawanan untuk membangkitkan semangat juang masyarakat untuk mengusir para penguasa asing dan juga kaki tangannya dari pihak pamong praja. Kondisi kacau ini dimanfaatkan juga oleh segelintir jawara untuk merampok, menyamun, dan

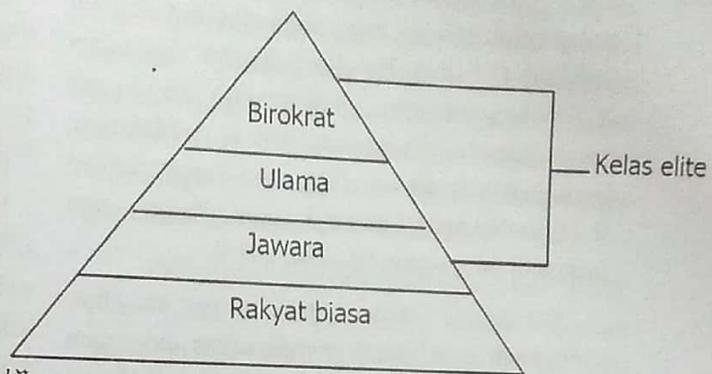
membegal yang terjadi di banyak tempat yang notabene tidak berkaitan dengan perlawanan terhadap para pihak kolonial. Mereka melakukan tindakan kriminal tanpa pandang bulu, termasuk kepada rakyat sendiri (Kartodirdjo: 1984). Keadaan ini pun dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial untuk merusak citra jawara dengan memberikan stigma negatif terhadap mereka dengan sebutan bandit. Ini kemudian membenturkan perlawanan terhadap penjajah yang dipimpin oleh Ki Wasid (1988) dianggap sebagai *onlus* (keonaran), *ongeregeldheden* (pemberontakan), *complot* (komplotan), *woelingen* (kekacauan) dan *onrust* (ketidakamanan) (Sunatra: 1997). Realitas ini juga dikemukakan Nugraha (2004) berikut:

Pada perkembangan berikutnya, khususnya kiai dan jawara, menjadi kelompok terpisah dan seakan-akan berbeda mazhab. Pendulum zaman yang terus berputar selanjutnya mengubah citra jawara yang dulu sebagai patriot menjadi orang yang sekadar "menjual" otot. Tindakan kriminal dan premanisme kerap dilekatkan. Bahkan dalam perpolitikan lokal saat maraknya pemilihan langsung kepala daerah, jawara dimobilisasi kandidat tertentu sebagai pengumpul suara.

Pergeseran citra dari jawara tersebut akhirnya membelokkan persepsi masyarakat Banten terhadap peranan jawara. Bahkan sebagian masyarakat ada yang menginginkan istilah jawara dihilangkan sehingga citra budaya "kekerasan" yang selama ini melekat pada masyarakat Banten bisa dihilangkan.

Walaupun terdapat stigma negatif terhadap jawara, hingga saat ini jawara tetap eksis dan memegang peranan penting secara sosial dan politis. Para 'pendekar' tersebut banyak yang memainkan peran dalam bidang ekonomi, sosial dan politik di Banten. Sehingga jika dilihat komposisi aktor politik di Banten saat ini sebagian besar merupakan bagian dari keluarga jawara yang mempunyai pengaruh besar di provinsi ini. Sehingga dapat ditarik pemahaman bahwa saat ini jawara sudah tidak lagi semata-mata memainkan peran tradisional mereka seperti dahulu.

Melihat dari keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh ulama dan jawara tersebut, maka dalam struktur masyarakat Banten, kedua kelompok ini bersama-sama dengan penguasa atau birokrat tergabung ke dalam kelas elit Banten.



Gambar 1.
Ulama dan Jawara dalam Stratifikasi Sosial Masyarakat Banten (Hufad: 2004)

Sebagai bagian dari kelas elit, ulama memiliki pengaruh kuat dalam bidang keagamaan, jawara memiliki pengaruh kuat dalam bidang adat. Kedua bidang ini merupakan unsur penting dalam struktur masyarakat Banten, tidak kalah pentingnya dari unsur pemerintahan yang dimiliki oleh kelompok birokrat.

Walaupun keberadaan kedua kelompok ini saling mendukung pada beberapa aspek, namun terdapat juga potensi konflik yang tidak dapat dihilangkan. Ulama memiliki corak kepemimpinan keagamaan sedangkan jawara (yang bukan tipe jawara ulama) lebih cenderung kepada kepemimpinan adat. Ulama memiliki kepentingan islamisasi dan berupaya menghilangkan pengaruh-pengaruh budaya Hindu sementara di lain sisi jawara berupaya untuk tetap mempertahankan adat istiadat yang dipengaruhi oleh pengaruh agama terdahulu tersebut (Sunatra: 1997).

Ulama dan Jawara dalam Dinamika Politik Lokal di Banten Ketika Orde Baru

Ketika Orde Baru berkuasa, pemerintahan bersifat sentralistis di Jakarta. Untuk itu, agar

daerah-daerah mudah untuk dikontrol maka penguasa pusat membutuhkan kaki-tangannya di daerah, termasuk di Banten (yang pada saat itu merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Sebagai elit kultural yang berpengaruh di Banten, pemerintah berusaha mendekati kelompok ulama dan jawara. Sebagai upaya awal menundukkan kedua kelompok ini, maka pada saat itu Gubernur Solichin G.P dan Panglima Kodam Siliwangi A.T Wilono menemui salah seorang ulama yang sangat dihormati di Banten, yaitu K.H. Mahmud, kemudian pada proses selanjutnya Pangkowilhan II (Jawa-Madura) Letnan Jenderal Surono juga menemui sang ulama (Hamid: 2013)

Sayangnya dalam pertemuan tersebut, pemerintah gagal untuk mendapatkan dukungan dari tokoh ulama. Tidak berhenti di situ, akhirnya Presiden Suharto mendatangi langsung para ulama kharismatik sehingga akhirnya K.H. Mahmud dan ulama lainnya mau menyatakan bahwa dirinya merupakan pendukung Golkar. Tindak lanjut dari deklarasi dukungan tersebut adalah dibentuknya organisasi Satkar Ulama pada 3 Mei 1970 dengan K.H. Mahmud sebagai ketua umumnya (Artati, 1988). Dengan turunnya Presiden Suharto untuk menemui mereka untuk mengharapkan dukungan dari ulama menandakan bahwa sentralnya posisi para pemimpin keagamaan tersebut bagi masyarakat Banten. Taktik dari pemerintah pusat ini dilakukan agar kuku kekuasaan pemerintah Orde Baru semakin kuat menancap di daerah-daerah.

Satkar Ulama tersebut kemudian bergabung sebagai bagian dari Hasta Karya, sebuah organisasi sayap dari Golkar. Organisasi Hasta Karya ini dibedakan menjadi dua. *Pertama*, organisasi yang mendirikan Golkar, seperti Kesatuan Organisasi Serba Guna Gotong Royong (Kosgoro), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi). *Kedua*, organisasi yang didirikan Golkar yaitu Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Satkar Ulama, Al-Hidayah, Himpunan Wanita Karya, and Majelis Dakwah Islamiyah (MDI). Manuver politik para ulama yang bernaung di bawah Satkar

Ulama ini mulai gencar mendekati Pemilu 1971. Mereka tidak hanya kampanye pada masing-masing pesantren dimana mereka mengabdikan tetapi juga turun aktif kepengajian-pengajian dan mesjid-mesjid. Materi kampanyenya berupa ajakan untuk mendukung pemerintah dengan memilih Golkar. Hasilnya tidak sia-sia karena kemudian Golkar muncul sebagai pemenang pemilu tersebut dengan suara sebesar 49,83% (Hamid: 2013).

Pada pemilu periode selanjutnya terjadi fusi partai-partai politik menjadi tiga partai saja, Partai-partai yang berbasis Islam seperti NU, Parmusi, PSII dan Perti melebur menjadi PPP dan partai-partai yang berbasis nasionalis serta Kristen seperti Parkindo, Murba, IPKI dan Partai Katolik bergabung menjadi PDI. Semua partai melakukan konsolidasi untuk memenangkan pemilu 1977, termasuk PPP. Hasilnya, khusus di Serang PPP berhasil menang dengan 54,97% suara dan menempatkan Golkar pada posisi kedua dengan 42,52% suara. Sedangkan PDI menempati posisi terakhir dengan perolehan suara 2,52%. Namun, kekalahan Golkar ini mengakibatkan para ulama dan pendukung PPP harus diinterogasi dan ditahan di Kodim (Artati:1988).

Kondisi ini menggambarkan tindakan represif yang akan diterima oleh ulama jika berseberangan dengan pemerintah dan Golkar. Dalam penelitiannya (Murtadlo: 2008) mewawancarai Abuya Dimiyati, salah seorang kyai kharismatik di Banten yang pernah dijebloskan ke penjara menjelang pemilu 1977 karena dianggap menyerang pemerintah. Berdasarkan pengakuannya, kejadian itu akibat imbas dari penyampaiannya didepan jamaah Jumat sebelum khutbah dimulai pada 11 Maret 1977 bahwasanya masyarakat jangan mau ditakut-takuti dan diintimidasi oleh salah satu peserta pemilu termasuk propaganda 'Golkar adalah pemerintah.' Dalam penyampaiannya, Abu Dimiyati meluruskan bahwa yang benar adalah 'Pemerintah adalah RI, bukan Golkar.'

Ketika rezim Orde Baru berkuasa, kedua elit lokal, utamanya ulama, tidak mendapatkan tempat yang kuat dalam politik lokal Banten, kecuali

hanya dijadikan sebagai alat untuk menggaet suara untuk keuntungan elektoral penguasa semata. Salah satu tindakan yang menunjukkan kondisi ini adalah dengan pelarangan penggunaan simbol-simbol agama sebagaimana yang dilakukan oleh PPP dengan lambang Ka'bah pada logo partainya. Pelarangan tersebut kemudian berimbas dengan digantinya logo partai tersebut dengan gambar bintang (Muslim, dkk: 2015). Selain itu, upaya fusi partai politik sehingga hanya menyisakan satu partai Islam seperti yang dijelaskan sebelumnya juga merupakan salah satu upaya menekan politik Islam yang dimainkan oleh ulama di Banten.

Selain itu, peranan sosial ulama pun digerus oleh berbagai instrumen kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Beberapa program tersebut seperti program Keluarga Berencana (KB) dan Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB). Akibatnya banyak ulama yang mendapatkan perlakuan kekerasan atas resistensi mereka terhadap program-program pemerintah tersebut, salah satunya seperti yang dialami oleh Kyai Sarmin. Banyak juga diantara mereka yang kemudian dilabeli sebagai anggota PKI (Partai Komunis Indonesia) ataupun NII (Negara Islam Indonesia) agar masyarakat menjauhi mereka (Muslim, dkk: 2015).

Tidak hanya ulama yang menjadi sasaran untuk dijadikan mesin politik pusat. Salah satu kelompok kultural lain di Banten, yaitu jawara juga menjadi target yang hendak dilunakkan. Tidak jauh berbeda dengan ulama di Banten, jawara juga merupakan kelompok yang dilemahkan oleh penguasa. Menurut H. Maman Badarzaman, jawara pada waktu itu cenderung *nyalindung dina gelung*, yang artinya berlindung kepada sanggul, atau dalam konteks ini berlindung kepada pihak penguasa dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan. Bentuk pencarian perlindungan itu terlihat dari bergabungnya sebagian ulama yang pragmatis kepada Satker Ulama dan juga jawara kepada Satker Jawara sehingga mereka mendapatkan fasilitas namun berada dalam hegemoni Golkar (penguasa). Bagi mereka tersebut diberikan imbalan berupa kedudukan

politik sebagai utusan Fraksi Utusan Golongan pada parlemen.

Khusus untuk jawara, pemerintah mendirikan Satuan Karya Jawara pada tahun 1971 yang kemudian berganti nama menjadi Persatuan Pendekar Pesilat Seni Budaya Banten Indonesia (PPPSBBI). Satkar jawara ini dipimpin oleh H. TB. Chasan Sohib yang dilantik oleh Jenderal Soerono. Upacara pelantikan ini bertempat di Batukuwung Serang dan dihadiri oleh Danrem 064/Maulana Yusuf Banten, Pangdam VI/Siliwangi, Gubernur Jawa Barat, dan beberapa pimpinan nasional (Hamid: 2013).

Hubungan yang dibangun antara pemerintah pusat (Golkar) dengan jawara adalah hubungan yang bersifat mutualisme. Pemerintah Orde Baru mendapatkan keuntungan elektoral sedangkan jawara mendapatkan keuntungan ekonomi yang kemudian sebagai cikal bakal keuntungan politik dalam membangun oligarki politik di Banten pasca reformasi. Akses ekonomi didapatkan dari monopoli pengerjaan proyek-proyek dari pemerintah pusat. Maka tidak heran jika sebagian besar jawara yang tergabung ke dalam PPPSBBI merupakan pengusaha, terutama pengusaha pelaksana proyek-proyek dari pemerintah. Para jawara yang juga pengusaha ini juga dikenal dengan sebutan Kelompok Rawu. Penyebutan ini berasal dari nama lokasi Pasar Tradisional Rawu, Banten karena di sana terdapat kantor KADIN sebagai pusat pengendalian bisnis mereka. Salah satu jawara yang sukses adalah Chasan Sohib yang bergerak dibidang konstruksi. Perusahaannya berkembang dengan pesat di awal Orde Baru. Ia menceritakan:

"Pada awal program pemerintah melaksanakan pembangunan Pelita I tahun 1969, saya membuat perusahaan jasa konstruksi di bidang pemborongan bangunan-bangunan, jalan-jalan, dan irigasi-irigasi. PT Sinar Ciomas Raya Contractor pada tahun 1973 melaksanakan pembebasan tanah di PT. Krakatau Steel. Bapak Tubagus Syaparudin memberikan kepercayaan kepada PT. Sinar Ciomas Raya Contractor untuk membangun pasar Rawu

di atas areal sekitar 50.000 m², kontrak *full financing*, pelaksanaan pembayaran APBD seadanya, bila dikabulkan tambahan secara berangsur dari dana inpres Pelaksana proyek Pasar Rawu diangsur sampai dengan lima tahun oleh Pemda Serang, dan dibantu oleh Depdagri, Bapak Amir Machmud“ (Mansur, 2000: 94).

Ulama dan Jawara dalam Dinamika Politik Lokal di Banten Pasca Reformasi

Ketika Suharto meletakkan jabatannya sebagai presiden setelah berkuasa lebih dari tiga dekade, Chasan Sochib sebagai kakitangan rezim yang runtuh mengadakan jumpa pers di alun-alun barat Kota Serang dengan menyatakan dukungan terhadap Suharto. Pernyataan tersebut disiarkan secara luas melalui media ke seluruh Indonesia yang pada akhirnya memancing kemarahan dari sebagian besar rakyat Indonesia. Akibatnya banyak orang-orang Banten terutama para mahasiswa yang mendapatkan perlakuan kekerasan. Mahasiswa Banten yang mendengarkan pernyataan tersebut juga marah dan mengepung kantor DPRD Serang dan akhirnya Chasan Sochib meminta maaf atas pernyataannya. [(Wawancara dengan Hasan Basri, mantan Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim (KAMMI) Banten, tanggal 10 Mei 2004)] dalam Hamid (2013)].

Runtuhnya rezim Orde Baru telah membuka peluang bagi diterimanya demokrasi sebagai pilihan yang paling realistis untuk Indonesia. Ditandai dengan bekerjanya mekanisme-mekanisme prosedural seperti pemilu langsung, kebebasan berpendapat, dan sebagainya. Namun, secara substansial, terdapat beberapa anomali dalam demokrasi dengan masih terlihatnya ciri-ciri zaman Orde Baru. Khusus dalam konteks politik lokal Banten, dominasi elit politik lokal masih tetap dikuasai oleh para jawara dan keluarganya karena mereka masih menguasai sumber-sumber ekonomi. Salah satu jawara yang masih eksis walaupun rezim telah berganti adalah Chasan Sochib yang merupakan cikal bakal berdirinya dinasti politik terbesar di Banten dimulai dengan

terpilihnya anaknya, Ratu Atut Choisyah sebagai Wakil Gubernur Banten pertama.

Tetap bertahannya dominasi jawara di Banten tidak lebih dikarenakan oleh masih kuatnya dominasi mereka terhadap sumber daya ekonomi di Banten dengan monopoli berbagai pengerjaan konstruksi. Dengan kekuatan finansial tersebut mereka dengan mudah untuk masuk ke dalam pemerintahan. Selain itu, kekuatan massa juga masih bisa mereka gerakkan melalui para jawara-jawara. Ini mengakibatkan demokrasi belum bisa menjegal para elit-elit oligarkis tersebut untuk tampil. Saluran politik masih tertutup bagi pihak lain karena mesin politik partai masih mereka kuasai.

Agar tetap bertahan, ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Chasan Sochib untuk memenangkan pemilihan Gubernur Banten pertama tahun 2001. *Pertama*, sebagai elit partai mereka mengatur siapa yang akan dimajukan dalam pemilihan. Posisi sebagai penentu arah kebijakan yang dimiliki oleh para elit yang didominasi oleh Jawara menguntungkan orang-orang yang terafiliasi dengan kelompok tersebut, biasanya adalah keluarga dekat baik karena pertalian darah ataupun karena perkawinan. Pada kondisi seperti ini, proses pencalonan tidak dilakukan secara terbuka dan *fair*. Walaupun terdapat prosedur seolah-olah didesain secara terbuka tapi sebenarnya tertutup. Jawara kemudian berhasil mengusung Ratu Atut sebagai calon wakil gubernur. Ratu Atut yang merupakan anak dari Chasan Sochib berhasil menyingkirkan Aly Yahya yang telah terlebih dahulu mendaftar sebagai calon gubernur dari partai Golkar.

Kedua, Jawara dengan strateginya berhasil merusak koalisi PPP dengan PDIP dengan merayu PPP agar mau berpasangan dengan calon dari Golkar dalam kontestasi. Chasan Sochib berhasil mendekati Djoko Munandar, ketua DPD PPP Banten agar mau diusung sebagai calon gubernur berpasangan dengan Ratu Atut dari Golkar. Dalam pencalonan ini, mesin politik utamanya adalah Golkar dan jawara yang mempunyai kemampuan dalam pengerahan massa. *Ketiga* Jawara sendiri tidak segan-segan melakukan tindakan intimidasi

dengan dalih untuk pengamanan. Bahkan jawara hadir dalam persidangan untuk memberikan tekanan secara psikologis agar hasilnya menguntungkan mereka. *Keempat*, dengan kekuatan finansial yang dimilikinya, jawara kerap melakukan politik uang dengan berbagai indikasi termasuk memberi suara anggota dewan dengan harga ratusan juta rupiah agar posisi mereka kuat. *Kelima*, mereka juga menguasai opini masyarakat dengan didukung oleh media-media lokal di Banten. Media-media tersebut berhasil dibeli ataupun ditekan bagi yang tidak mau kooperatif.

Besarnya peran Chasan Sochib, sang tokoh jawara akan kemenangan Djoko-Atut diakuinya sendiri dalam menjawab pertanyaan wartawan terkait pengaruhnya dalam keberhasilan memenangkan kontestasi gubernur yang diusungnya. Hasil wawancara yang dipublikasikan dalam Tabloid Mimbar:

“Tidak seperti itu. Abah cuman kasih pandangan-pandangan. Kalau dia berbuat keliru dalam mengemban amanah kepemimpinan di Banten, Abah akan luruskan. Sebab Abah yang paling bertanggung jawab dengan Djoko. Sebab dia naikkan atas dukungan Abah. Oleh karena itu Abah malu kalau Djoko keliru dalam memimpin. Kalau keliru memimpin lebih baik tanggalkan saja jabatannya itu. Djoko itu kan tidak ada apa-apanya.” (Saya memang Gubernur Jendral, dalam Tabloid Mimbar Daerah, Edisi 17-23 November 2003)

Semenjak Ratu Atut berhasil menjabat sebagai wakil gubernur, maka terbukalah keran bagi anak keturunan Chasan Sochib yang lainnya untuk mengkooptasi pos-pos jabatan politik di Banten bahkan nasional. Berikut ini Tabel.1 daftar keluarga Chasan Sochib yang berhasil memenangkan pemilihan:

Tabel 1 Dinasti Ratu Atut Choisiyah

No.	Nama	Hubungan Keekerabatan	Posisi Politik
0.	Chasan Sochib	Pendiri	
1.	Ratu Atut Choisiyah (RAC)	Anak	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Gubernur 2002-2005 PLT Gubernur 2005-2007 Gubernur 2007-2012
2.	Ratna Komalasari	Istri (Ibu tiri RAC)	Anggota DPRD Kota Serang 2009-2014
3.	Heryani	Istri (Ibu tiri RAC)	<ul style="list-style-type: none"> Anggota DPRD Kab. Pandeglang 2009-2014 Wabup Pandeglang 2011-2016
4.	Tubagus Hairul Jaman	Anak	<ul style="list-style-type: none"> Wakil Wali kota Serang 2008-2011 Wali kota Serang 2011-2018
5.	Ratu Tatu Chasanah	Anak	<ul style="list-style-type: none"> Anggota DPRD Banten 2009-2014 Wakil Bupati Serang 2010-2015 Bupati Serang 2016-2021
6.	Ratu Ella Wurella	Sepupu RAC	Anggota DPRD Banten 2009-2014
7.	Hikmat Tomet	Menantu (Suami RAC)	Anggota DPR RI 2009-2014
8.	Aden Abdul Khaliq	Anak	Anggota DPRD Banten 2009-2013
9.	Andika Hazrumy	Cucu	<ul style="list-style-type: none"> Anggota DPD 2009-2014. Anggota DPR RI 2014-2019
10.	Andiara Aprilia Hikmat	Cucu	Anggota DPD (2014-2019)
11.	Airin Rachmi Diany	Menantu RAC	Wali kota Tangerang Selatan 2011-2021
12.	Adde Rosi Khoerunnisa	Cucu	Anggota DPRD Kota Serang 2009-2014
13.	Tanto Warsono Arban	Menantu RAC	<ul style="list-style-type: none"> Anggota DPRD Banten 2014-2016 Wakil Bupati Pandeglang 2016-2021

Sumber: Diolah penulis

Tabel 2 Dinamika Peran Sosial Politik Ulama dan Jawara

No.	Periodesasi Pemerintahan	Peran Sosial Politik	
		Ulama	Jawara
1.	Kesultanan Banten	<ul style="list-style-type: none"> • Pejabat pemerintahan • Penasehat agama (kadi) • Pelaksana syiar/dakwah 	Pengawal kerajaan
2.	Kolonialisme Belanda	<ul style="list-style-type: none"> • Aktor utama gerakan perlawanan • Suksesor kepemimpinan elit desa • Pelaksana syiar/dakwah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawal gerakan perlawanan • Pejabat pemerintahan desa (sebagai jaro) • Bandit sosial
3.	Awal Kemerdekaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pejabat pemerintahan • Pejabat militer • Perekat (unsur pemersatu) negara kesatuan RI • Pimpinan pejuang pembela kemerdekaan • Pelaksana syiar/dakwah • Guru supra natural 	<ul style="list-style-type: none"> • Guru silat • Guru ngaji • Ahli pengobatan tradisional • Laskar pejuang pembela kemerdekaan
4.	Orde Baru	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Vote getter</i> politik pemerintah • Pelaksana syiar/dakwah 	<ul style="list-style-type: none"> • Guru silat • Guru ngaji • Ahli pengobatan tradisional • <i>Vote getter</i> politik pemerintah
5.	Reformasi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Vote getter</i> partai politik • Pelaksana syiar/dakwah 	<ul style="list-style-type: none"> • Guru silat • Ahli pengobatan tradisional • <i>Vote getter</i> partai politik • <i>Political broker</i> • <i>Economic broker</i> • Pejabat politik

Sumber: Kartodirdjo (1984), Tihami (1992), Suharto (2001), Hamid (2010), (Muslim,dkk: 2015) dan pengamatan penelitian yang diolah penulis

Dari uraian di atas tampak hal yang paling tampak dalam realitas pasca berakhirnya orde baru adalah pergeseran peranan ulama dan jawara dalam konfigurasi politik lokal Banten. Pergeseran yang terjadi adalah dari semula yang mengemban peranan sebagai *cultural broker* menjadi *political broker*. Bedanya, jawara dalam peranan ini jauh melampaui dan mendominasi golongan ulama sehingga saat ini jawara merupakan dominator dalam percaturan politik Banten dilihat dari jaringan dinasti politik mereka yang sudah mengakar kuat. Melihat gejala ini, Faridl (2003) menilai dominasi jawara ini diakibatkan oleh kegagalan golongan ulama karena tidak adaptif dengan perubahan sistem politik yang terlalu cepat dari lahirnya era reformasi. Berikut ini ditampilkan dinamika peran kedua elit tradisional tersebut pada Tabel 2.

SIMPULAN

Ulama dan jawara merupakan elit tradisional yang mempunyai sejarah panjang di Banten. Sejak awal peranan keduanya sangat dinamis, ketika zaman kesultanan ulama menempati posisi yang strategis di tengah-tengah masyarakat, baik sebagai pemimpin pemerintahan maupun sebagai penyiar agama. Di sisi lain jawara karena keunggulan bela diri yang dimilikinya, mereka bertugas sebagai pengawal kerajaan, mencegah dan memertahankan serangan dari pihak luar. Ketika zaman kolonial tiba, peranan ulama masih tetap dominan karena dikenal sebagai motor penggerak perlawanan terhadap penjajah dan dipercaya sebagai pemegang kepemimpinan desa. Begitu juga dengan jawara yang berperan

dalam mengawal ulama dan di tingkat desa mereka dipercaya sebagai jaro. Pada masa awal kemerdekaan, selain tugas keulamannya dalam syiar Islam, ulama juga dipercaya dalam pos-pos jabatan sipil dan militer dan lambang pemersatu bangsa.

Sementara itu, jawara karena merupakan murid dari ulama dalam hal keagamaan juga berfungsi dalam menyampaikan syiar Islam, pengawal ulama dan dengan kemampuan ilmunya juga sebagai ahli pengobatan tradisional. Pergeseran terjadi ketika dimulainya orde baru. Kedua kelompok tersebut difungsikan oleh

penguasa sebagai peraup suara dari masyarakat (*vote getter*). Kecenderungan tersebut ternyata terus terjadi hingga reformasi, terutama setelah otonomi daerah ketika cengkraman pusat tidak kuat lagi ke daerah. Para jawara tampil secara dominan menguasai politik lokal Banten dengan sumber daya finansial yang dibangun semenjak orde baru. Dengan kemampuannya sebagai *economic* dan *political broker*, jawara berhasil menguasai Banten dengan jaringan dinasti politik yang mengakar kuat. Sementara itu, ulama walaupun masih tetap sebagai *vote getter* tapi tidak mendominasi politik lokal Banten secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Artati, Sudiarti. 1988. *Perubahan Peran Ulama di Serang*. Skripsi Sarjana Strata 1 Jurusan Sosiologi FISIP UI.
- Danial, Dian Wahyu. 2016. *Peran Elit Jawara dalam Pengambilan Keputusan (Studi Kasus pada Proyek Pembangunan Jalan Raya Cibungur-Patia di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten)*, Kajian Administrasi dan Pemerintahan Daerah, Volume 09 No. 5/ Agustus 2016
- Faridl, M. 2013. *Peran Sosial Politik Kiai di Indonesia*. Jurnal Mimbar. Vol. 19, No. 2 Tahun 2013, pp. 195-202.
- Hamid, Abdul. *Memetakan Aktor Politik Lokal Banten Pasca Orde Baru: Studi Kasus Kiai dan Jawara di Banten*, dalam: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/download/4887/4433>
- Hufad, M. 2004. *Sosialisasi Identitas Kekerabatan Pada Keluarga Inti di Menes Banten*. Disertasi Doktor PPs Unpad Bandung.
- Ichwan, Moch Nur. 2013. *The majelis Ulama Indonesia and the Politics of Religious Orthodoxy*. in Martin van Bruinessen (ed.). *Contemporary in Indonesian Islam: Explaining the Conservative Turn*. Singapore: ISEAS.
- Karomani. 2005. *Ulama dan Jawara: Studi tentang Persepsi Ulama terhadap Jawara di Menes Banten Selatan*. Jurnal Mediator. Vol. 6, No. 2, pp. 228-235.
- Kartodirdjo S. 1984. *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Kartodirdjo, Sartono. 1983. *Elite dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: LP3S.
- Lubis, N.H. 2003. *Banten dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara*.
- Mansur, Khatib. 2000. *Profil Haji Tubagus Chasan Sohib Beserta Komentar 100 Tokoh Masyarakat Seputar Pendekar Banten*, Jakarta: Penerbit Pustaka Antara Utama.
- Mardalis. 1993. *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*, Cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara
- Muslim, Asep, dkk. 2015. *Dinamika Peran Sosial Politik Ulama dan Jawara di Pandeglang Banten*. MIMBAR. Vol. 31, No. 2 (Desember, 2015): 461-474
- Nazir, Mohammad. 1988. *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nugraha, Pepih. 2006. *Jawara sebagai Kenyataan Sosial*. <http://www.kompas.com>
- Ong Hok Ham, 2002. *Dari Soal Pryayi Sampai Nyi Blorong: Refleksi Historis Nusantara*, Penerbit Buku Kompas Pustaka. Jakarta: LP3ES.

- Purwadi, Didi. 2017. *Banten Miliki Ribuan Pesantren, Ini Komentar Sang Gubernur*, tanggal 28 Nov 2017 <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/11/28/p04uqr257-banten-miliki-ribuan-pesantren-ini-komentar-sang-gubernur>
- Rozaki, Abdur. 2004. *Menabur kharisma menuai kuasa: kiprah kiai dan blater sebagai rezim kembar di Madura*, Pustaka Marwa
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metodologi Penelitian*. www.psend.users.com/jsarwono.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto. 2001. *Banten Masa Revolusi, 1945-1949: Proses Integrasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Disertasi). Depok: UI.
- Sunantra. 1997. *Integrasi dan Konflik Kedudukan Politik Jawara dan Ulama dalam Budaya Lokal. Studi Kasus Kepemimpinan di Banten*. Bandung: PPs Unpad.
- Tabloid Mimbar Daerah, Edisi 17-23 November 2003. "Saya memang Gubernur Jenderal."
- Tihami. 1992. *Kiai dan Jawara di Banten Studi tentang Agama, Magi, dan Kepemimpinan di Desa Pasanggrahan Serang*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Von Bruinessen, Martin. 1995. *Shari'a Court, Tarekat and Pesantren: Religious Institutions in the Sultanate of Banten*" Archipelago Journal, : 165-200.
- Williams, Michael C. 2003. *Arit dan Bulan Sabit. Pemberontakan Komunis 1926 di Banten*. Terj. Chandra Utama. Jakarta: Syarikat Indonesia